

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia untuk Pengembangan Kapasitas Negara Anggota Colombo Plan

Ahmad Syakir¹
UIN Sunan Ampel Surabaya
itsahmadsyakir@gmail.com

Nur Luthfi H²
UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Artikel Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan di balik kebijakan pemberian bantuan luar negeri oleh Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas negara-negara anggota Colombo Plan, khususnya dalam konteks kerja sama Selatan-Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan Teori Analisis Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy Analysis/FPA) serta teknik pengambilan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bantuan luar negeri Indonesia didasari oleh kerangka hukum nasional, perubahan status Indonesia menjadi *Upper Middle Income Country*, serta amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam pembangunan global di Kawasan Selatan. Di samping itu, pemberian bantuan ini juga merepresentasikan upaya untuk mendorong kepentingan nasional, seperti memperluas akses perdagangan dan investasi, memperkuat posisi diplomatik di kawasan Asia Pasifik, serta menegaskan peran strategis Indonesia dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui skema Kerja Sama Selatan–Selatan.

Keywords: Indonesia, Colombo Plan, bantuan luar negeri, kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, pengembangan kapasitas.

PENDAHULUAN

Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, sistem bipolar yang mewarnai era Perang Dingin ditandai oleh dominasi kekuatan Barat, rivalitas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta munculnya tatanan ekonomi global baru melalui Institusi Bretton Woods. Selain itu, periode ini juga diwarnai oleh gelombang dekolonisasi dan bangkitnya gerakan nasionalisme di

berbagai wilayah, tumbuhnya praktik multi-lateralisme dalam hubungan internasional, meningkatnya interdependensi ekonomi antar negara, serta peran yang semakin signifikan dari aktor-aktor transnasional dalam dinamika politik global (Trinidad, 2014, hlm. 2). Dalam pemulihan ekonomi internasional, Amerika menata ulang Kembali dengan menggunakan program Marshall Plan untuk pemulihan di kawasan Eropa Barat sebagai awal dari perang dingin (*The*

Marshall Plan: Dawn of the Cold War, 2025). Dilain sisi, Uni Soviet membentuk the Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) untuk ke-mandirian ekonomi di kawasan Eropa Timur dalam mempromosikan perdagangan mereka (Leon, 1964, hlm. 19). Kedua kekuatan besar ini menimbulkan tindakan kolektif yang ditunjukkan dari negara dunia ketiga untuk berkumpul dalam sebuah konferensi di Bandung, Indonesia pada tahun 1955.

Konferensi yang diadakan di Bandung ini menjadi dasar terbentuknya istilah yang disebut dengan Kerja sama Selatan – Selatan. Hasil dari konferensi Adalah *Dasasila Bandung* sebagai bentuk solidaritas di kawasan Selatan. Perkembangan konferensi ini menciptakan berbagai transformasi serta penguatan jati diri seperti terbentuknya Gerakan Non-Blok, Kelompok 15, Buenos Aires Plan of Action, Accra Agenda for Action, High Level Meeting on Aid Effectiveness, hingga South Summit di Kuba pada tahun 2000 dan Resolusi PBB No. 58/220 tentang Pembentukan High Level Committee on South-South Cooperation yang merupakan kerja sama teknik antar negara berkembang.

Indonesia berupaya turut aktif dalam dunia internasional dalam Kerja Sama Selatan – Selatan dengan dasar Undang-Undang No.17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Pemerintah Indonesia, 2007). Hal ini terlihat untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadi-

lan sosial yang sesuai dengan amanat konstitusi yang berusaha dipertahankan secara konsisten. Memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki, Indonesia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan internasional dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta mewujudkan visi menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam politik luar negeri serta kerja sama di tingkat regional maupun internasional menjadi sangat krusial. Terutama dalam melihat dinamika politik dan hubungan internasional yang terus dinamis dan berubah secara cepat.

Dalam hal ini, Indonesia menyadari bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen penting dalam diplomasi. Karena itu, Indonesia menempatkannya sebagai prioritas dengan berupaya mengukuhkan peran sebagai *new emerging donor* melalui konsistensi dalam pemberian bantuan, baik berupa kerja sama teknik maupun hibah, sejalan dengan statusnya sebagai negara *middle-income* dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (Hutabarat dan Damayanti, 2023, hlm. 3). Pemerintah Indonesia membentuk Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan, yang melibatkan beberapa kementerian terkait, dibentuk melalui Keputusan Menteri PPN No. 67 Tahun 2011 untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama tersebut. Kemudian disusul Pada 18 Oktober 2019, Pemerintah Indonesia meresmikan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

(LDKPI) atau *Indonesian AID* sebagai instrumen diplomasi *tangan di atas* [11] serta bentuk komitmen dalam memperkuat kerja sama pada tingkat global maupun regional (*Wakil Presiden RI*, 2019). Lembaga ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan dana hibah Indonesia berlangsung secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Kemlu RI, 2020, hlm. 67).

Terdapat penambahan unsur Triangular dalam kerja sama ini menjadi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Hal ini dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional keputusan menteri PPN No.51 tahun 2013. Istilah *triangular* merujuk pada bentuk kerja sama tiga pihak, yang melibatkan Indonesia sebagai negara pendonor, negara penerima manfaat, serta lembaga mitra. (Kemlu, 2023, hlm. 9). Salah satu mitra Indonesia dalam mengimplementasikan program ini adalah Colombo Plan.

Colombo Plan merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pemulihan dan penguatan peluang pembangunan ekonomi di Asia-Pasifik, terutama bagi negara berkembang melalui Kerja sama Selatan – Selatan (The Colombo Plan, 2025). Melalui kerja sama yang ditandatangani pada tahun 2021 dengan judul *Arrangement Between of The Minister of State Secretariat of The Republic of Indonesia and The Colombo Plan Secretariat on South-South and Triangular Cooperation Programmes*. Didalamnya memuat tentang kerja sama teknis yang

berfokus pada program Inovasi dan manajemen pengetahuan, pemberdayaan Perempuan, industri kecil dan menengah serta perubahan iklim (Kemensetneg, 2025).

Melalui landasan kerja sama Selatan-Selatan dan triangular, Indonesia berupaya berkontribusi dalam peningkatan kapasitas negara-negara di belahan bumi selatan melalui program bantuan luar negeri. Colombo Plan berfungsi sebagai mitra strategis Indonesia dalam merealisasikan kerja sama ini, di mana bantuan yang diberikan dikhususkan bagi para negara anggota Colombo Plan. Merujuk pada konteks tersebut, diperlukan sebuah pemahaman mengenai motivasi Indonesia dalam menyalurkan bantuan luar negerinya untuk peningkatan kapasitas negara anggota Colombo Plan. Atas dasar itu, penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh alasan-alasan yang melatarbelakangi pemberian bantuan tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL

Foreign Policy Analysis

Menurut Breuning, Foreign Policy Analysis adalah Upaya untuk memahami mengapa para pemimpin membuat pilihan yang mereka lakukan dan juga bagaimana kendala dan peluang domestik dan internasional dalam mempengaruhi pilihan mereka (Breuning, 2007, hlm. 6). Menurutnya juga, para pemimpin tidak beroperasi dalam ruang hampa. Kebijakan mereka dibentuk oleh lingkungan yang kompleks, yang mencakup aparatur birokrasi, tekanan politik domestik, dan kapasitas nyata dari kekuatan nasional yang dapat

digunakan dalam diplomasi internasional. Tujuan utama menganalisis kebijakan luar negeri adalah memahami pola-pola umum yang melatarbelakangi bagaimana suatu keputusan dibuat, bagaimana suatu negara bertindak, dan apa hasil dari tindakan tersebut.

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada negara sebagai unit Analisis. Indonesia menjadi aktor utama dalam penelitian ini. Dalam rangka ini, terdapat perbedaan antara tingkat analisis negara dan sistem melalui konsep two-level games. Konsep ini menekankan bahwa pembuat kebijakan luar negeri harus secara bersamaan dapat memenuhi tuntutan konstituen domestik sekaligus menyesuaikan diri dengan keharusan di tingkat internasional (Breuning, 2007, hlm. 184).

Pada level nasional, kelompok domestik berupaya memperjuangkan kepentingannya dengan menekan pemerintah agar mengadopsi kebijakan yang menguntungkan, sementara politisi berusaha memperoleh kekuasaan melalui pembentukan koalisi di antara kelompok-kelompok tersebut. Pada level internasional, pemerintah berupaya mengoptimalkan kapasitasnya untuk merespons tekanan domestik sekaligus meminimalkan dampak negatif dari dinamika global. Kedua level ini tidak dapat diabaikan oleh para pengambil keputusan, selama negara-negara tetap berada dalam kondisi

saling ketergantungan namun tetap menjunjung kedaulatan.(Putnam, 1988, hlm. 434).

Bantuan Luar Negeri

Menurut Lancaster, Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer sumber daya publik dengan sukarela dari pemerintah ke pemerintah lain, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional dengan setidaknya terdapat 25 persen unsur hibah. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi manusia di negara penerima bantuan atau manfaat (Lancaster, 2008, hlm. 9). Dalam pendistribusian bantuan luar negeri, Lancaster membaginya menjadi empat tujuan utama yaitu sebagai tujuan diplomasi, komersial, kemanusiaan, dan Pembangunan.

Dalam penelitian ini, jenis bantuan yang digunakan adalah bantuan teknis. Bantuan teknis meliputi penyediaan keterampilan, pengetahuan, serta pendampingan dari para ahli. Selama beberapa dekade, bentuk bantuan ini juga diwujudkan melalui penempatan tenaga pengajar. Para pelatih dengan keahlian khusus berperan penting dalam mentransfer keterampilan yang diperlukan oleh penerima bantuan guna menjawab kebutuhan mereka sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan (Chibuzor and Orji, 2023, hlm. 282).

Pengembangan Kapasitas

Menurut Peter Morgan, Pengembangan kapasitas didefinisikan sebagai suatu pertumbuhan dalam hal hubungan dan kemampuan organisasi formal, yang

merupakan suatu perubahan pada perilaku, nilai-nilai, keterampilan, dan hubungan organisasi. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dan organisasi dalam melaksanakan fungsi serta mencapai hasil yang diinginkan secara berkelanjutan (Morgan, 1997, hlm. iii). Peter Morgan menekankan bahwa pengembangan kapasitas melibatkan perbaikan modal fisik dan manusia serta perubahan perilaku yang tertanam secara kolektif untuk menciptakan perbaikan sistemik dan budaya organisasi. Prinsip utamanya adalah bahwa perubahan ini harus berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu atau organisasi tertentu.

Kerja sama Selatan – Selatan dan Triangular

Menurut United Nations Office for South-South Cooperation, kerja sama selatan-selatan merupakan upaya masyarakat dan negara-negara di Kawasan selatan yang memiliki latar belakang yang sama, memiliki tujuan dan solidaritas yang sama serta dinaungi oleh prinsip-prinsip penghormatan atas kedaulatan nasional tanpa syarat apapun (UNOOSC, 2025). Yang kemudian unsur Triangular merupakan keterlibatan ke-mitraan yang digerakkan oleh selatan yang dimana dua atau lebih negara berkembang yang didukung oleh negara maju ataupun organisasi multilateral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki secara mendalam isu hubungan internasional yang bersifat kompleks dan multidimensi. Menurut Mochtar Mas'ood dalam meneliti isu hubungan internasional harus bersifat saintifik yang dimana tujuan akhir dari sains adalah deskripsi, eksplanasi, dan prediksi (Mas'ood, 1990, hlm. 79). Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian yang meliputi motivasi, perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Studi yang mengkaji peran Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara berkembang ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif, karena memerlukan analisis mendalam terhadap latar historis dan kapabilitas negara dalam pemberian bantuan tersebut.

Pendekatan secara eksplanatif digunakan dalam penelitian ini yang dirancang untuk menyelidiki sebuah fenomena yang belum dipelajari atau dijelaskan secara memadai. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dengan mengungkap alasan "mengapa" dari subjek yang diteliti yaitu Indonesia sebagai subjek dan aktor utama.

J.David Singer mengungkapkan bahwa dalam setiap kegiatan tentang keilmuan, selalu terdapat beberapa cara untuk memilih serta mengatur fenomena

yang dipelajari untuk menganalisa yang sistematis. Peneliti harus dapat menentukan pusat perhatian pada bagian-bagiannya atau pada keseluruhan fenomena tersebut (Singer, 1960, hlm. 453) Maka Indonesia menjadi aktor utama dalam subjek penelitian dengan unit analisis level negara bangsa.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari beberapa sumber diantaranya publikasi resmi pemerintah Indonesia dan wawancara Tim Koordinasi Nasional Kerja sama Selatan – Selatan. Kemudian dalam pengambilan data sekunder, peneliti mengumpulkan melalui berbagai publikasi organisasi, media massa, dan karya ilmiah. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Pemberian Bantuan Luar Negeri

Indonesia memiliki landasan konstitusional untuk memberi bantuan kepada negara lain yang bersumber dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Didalamnya dinyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan untuk turut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi, berlandaskan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia mengambil peran aktif dalam hubungan internasional dengan memberikan bantuan kepada negara lain. Bentuknya diwujudkan melalui

berbagai kerja sama, termasuk bantuan kemanusiaan dan dukungan bagi perdamaian dunia, sebagai bentuk komitmen nyata untuk menciptakan keadilan dan perdamaian global berdasarkan landasan konstitusi tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri diperinci terkait dasar pelaksanaan politik luar negeri. Landasan politik luar negeri Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN sebagai pedoman utama untuk merumuskan arah, prinsip, dan tujuan kebijakan tersebut. Namun pada era Reformasi, GBHN mengalami amandemen dan digantikan posisinya oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Holle, 2019). Kedua instrumen ini kemudian berfungsi sebagai pedoman strategis guna mengarahkan kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia agar selaras dengan visi pembangunan nasional, prioritas global, dan mencapai kepentingan diplomatik jangka panjang.

Pelaksanaan pemberian bantuan luar negeri Indonesia dalam Kerangka Kerja sama Selatan – Selatan (KSS) yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Selatan-Selatan, sebuah lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 67 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Selatan – Selatan. Pembentukan Tim Kornas tidak hanya sebagai respons, tetapi juga perwujudan komitmen Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan. Komitmen ini berakar pada semangat solidaritas negara-negara Selatan yang dideklarasikan dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 (Kemensetneg, 2025).

Tim Kornas Sebagai salah satu lembaga pelaksana kebijakan luar negeri, hal ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Hubungan luar negeri diselenggarakan berdasarkan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Sebagai perwujudan dari praktik internasional, Indonesia merancang berbagai kegiatan dalam naungan Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) yang berorientasi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) (Kemlu RI, 2023). Berbagai bentuk kerja sama pembangunan, termasuk KSS, memiliki landasan konseptual yang menekankan peran strategis multi *stakeholder* dalam menciptakan tatanan global yang berwawasan lingkungan, inklusif, dan berdampak ekonomi luas. Pendekatan ini selaras dengan tujuan utama KSS, yakni mewujudkan pembangunan ekonomi global yang adil dan setara.

Dalam pemberian bantuan luar negeri Indonesia kepada Colombo Plan

terlihat sudah sejalan dengan dasar kebijakan luar negeri Indonesia yang memang ditujukan untuk melaksanakan ketertiban dunia. Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan Colombo Plan dengan nama “*Arrangement between the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia and the Colombo Plan Secretariat on South-South and Triangular Cooperation Programmes*” pada tanggal 4 Mei 2021 (Kemensetneg, 2025). Perjanjian kerja sama ini merupakan suatu instrumen diplomasi yang digunakan oleh Indonesia untuk mengoperasionalkan kebijakan luar negerinya. Substansi perjanjian berfokus pada penyediaan program bantuan teknis berupa pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara anggota Colombo Plan. Secara institusional, perjanjian ini ditandatangani oleh dua pihak yaitu Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan organisasi Colombo Plan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Colombo Plan.

Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa Indonesia akan melakukan kerja sama dengan Colombo Plan untuk memberikan bantuan teknis berupa pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas di bidang Perubahan Iklim, Industri Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Perempuan, dan Manajemen Inovasi dan Pengetahuan (Kemensetneg, 2025). Dalam kesepakatan ini, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam men-

dukung pembangunan global yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam partisipasinya dalam mencapai SDGs. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan melalui peran aktif Indonesia di tingkat internasional, khususnya dalam mem-fasilitasi kerja sama antar negara berkembang.

Bantuan Teknis yang diberikan Indonesia kepada Colombo Plan masuk kedalam konsep hibah (Kemensetneg, 2025). Hal ini tertuang jelas dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Pada Pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk lembaga asing disebut sebagai hibah. Yang kemudian diperjelas secara spesifik pada Pasal 2 ayat satu yang menyebutkan bahwa peraturan ini meliputi pengaturan pemberian Hibah berupa uang. Pemberian hibah uang yang dimaksud disini adalah uang untuk pembiayaan kegiatan, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal pasal 3 ayat 2 (b). Maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberian bantuan ini masuk kedalam kategori Hibah.

Bantuan teknis ini tidak tidak diberikan dalam bentuk pendanaan secara langsung, akan tetapi sudah dibentuk menjadi sebuah pelatihan dengan Indonesia sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan.

Audiens Domestik

Pada awal Orde Baru, muncul kekhawatiran akan pasifnya politik luar negeri

Indonesia, sebuah pendekatan yang sangat kontras dengan era Sukarno. Di bawah Sukarno, Indonesia bercita-cita memimpin front anti-imperialis dengan meyakinkan rakyat bahwa konfrontasi total terhadap penjajah adalah solusi dari stagnasi ekonomi. Sebaliknya, pemerintahan Soeharto lebih berorientasi pada pencarian bantuan ekonomi dan investasi modal dari Barat. Akibatnya, sikap anti-imperialis ditinggalkan dan sikap konfrontasi digantikan oleh kepasifan serta fokus pada kerja sama regional (Weinstein, 2007). Hal ini sebagian muncul dari kebijakan luar negeri sehingga menjadi keyakinan yang meluas di kalangan elit politik luar negeri Indonesia, bahwa Indonesia harus menjadi pemimpin, paling tidak di kawasan Asia Tenggara dan harus memainkan peran secara global.

Sebagian besar masa pemerintahannya, Soeharto benar-benar memusatkan perhatian pada pembangunan dalam negeri. Baru pada awal dekade 1990-an, rezimnya mulai memposisikan kembali dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif (Graf dkk., 2017). Di akhir masa kekuasaannya, Presiden Soeharto mulai menggeser kebijakan luar negeri menjadi lebih dinamis dengan mempromosikan Kerja Sama Selatan-Selatan. Strategi ini tidak hanya dirancang untuk menjawab keresahan di dalam negeri, tetapi juga menjadi alat politik guna mengukuhkan legitimasi rezimnya yang tengah menghadapi tekanan internal yang kian rumit. Pada hakikatnya, kebijakan ini merupakan upaya sistematis untuk

menggunakan diplomasi internasional sebagai sarana menstabilkan situasi domestik sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia.

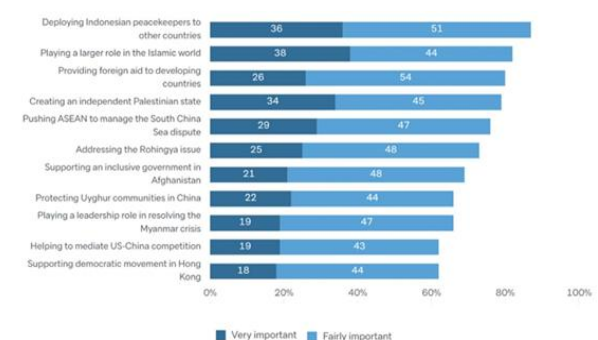
Jika dilihat lebih dalam lagi terkait respon Masyarakat terhadap Kerja sama Selatan – Selatan, maka Masyarakat masih bersifat *Inward-Looking*. Hasil ini merupakan survei terhadap 2.000 mahasiswa dan 200 dosen Hubungan Internasional dari berbagai penjurusan Indonesia mengungkap suatu kecenderungan pemikiran yang lebih terarah ke dalam *inward-looking*. Meski pemahaman mereka mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan masih terbatas, sebagian besar responden justru mendukung program ini dan berharap pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi yang konkret bagi pembangunan ekonomi Indonesia (Universitas Indonesia, 2021). Kurangnya komunikasi dan edukasi publik menyebabkan pemahaman terhadap tujuan strategis dan manfaat Kerja Sama Selatan-Selatan bagi kepentingan nasional menjadi sangat rendah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan dukungan sosial politik yang vital untuk menjaga legitimasi dan kelangsungan program diplomasi pemerintah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lowy Institute Indonesia Poll 2021 pada 29 November hingga 24 Desember 2021 dengan mensurvei kepada 3000 masyarakat di 33 provinsi (Bland dkk., 2021).



Gambar 1. Goals of Indonesia Foreign Policy (Lowy Institute, 2021)

Sebanyak 86% responden menganggap promosi perdamaian dan penyelesaian konflik sebagai tujuan yang sangat penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Temuan ini mencerminkan dukungan mayoritas terhadap langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas regional dan mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan kerja sama internasional.



Gambar 2. Importance of Peace and Conflict Resolution Goal (Lowy Institute, 2021)

Sebanyak 80% responden menempatkan pemberian bantuan kepada negara berkembang sebagai prioritas utama dalam agenda perdamaian Indonesia. Dukungan yang tinggi ini menunjukkan

keyakinan publik bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam membangun stabilitas dan solidaritas global.

Pemberian bantuan kepada negara-negara anggota Colombo Plan merupakan perwujudan nyata dari komitmen ini. Masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan pengembangan kapasitas sebagai wujud kontribusi aktif Indonesia bagi kemajuan kawasan. Dukungan ini sekaligus menunjukkan bahwa publik memandang diplomasi bantuan bukan sekadar sebagai kewajiban moral, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mewujudkan tatanan global yang lebih adil dan setara.

Namun, pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) secara spesifik masih relatif rendah. Rendahnya pengetahuan ini mencerminkan kecenderungan *inward-looking*, dimana publik lebih fokus pada dukungan terhadap program KSS daripada memahami esensi dan mekanismenya. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif, agar masyarakat tidak hanya sekedar pendukung pasif, tetapi juga dapat menjadi pelaku yang sadar akan peran Indonesia dalam arsitektur pembangunan global.

Kapabilitas Indonesia

Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan tanggal 3 Juli 2023, Indonesia dinyatakan telah berhasil naik kelas dari kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*Lower-Middle Income Country/LMIC*) menjadi negara berpendapatan menengah-atas (*Upper-Middle Income Country/UMIC*) (Kementerian Keuangan, 2023). Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia per 1 Juli 2023, Indonesia resmi naik status menjadi negara berpendapatan menengah-atas (*upper-middle-income country*). Kenaikan ini ditopang oleh capaian Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia yang mencatat USD 4.580 pada tahun 2022, atau tumbuh 9,8% dari angka tahun sebelumnya sebesar USD 4.170. Dengan capaian tersebut, Indonesia kini berada dalam kisaran kategori UMIC menurut standar Bank Dunia, yaitu antara USD 4.466 hingga USD 13.845 (Rivani, 2023).

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, kenaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah-atas tidak serta-merta memulihkan pertumbuhan ekonomi ke level pra-pandemi. Ia memandang bahwa kenaikan ini bersifat sementara, karena terutama ditopang oleh lonjakan pendapatan ekspor dari komoditas primer dan setengah jadi yang belum terolah secara maksimal (Mediatama, 2023). Pemerintah Indonesia tampak memanfaatkan momentum status UMIC ini sebagai *tools of diplomacy* untuk

memperluas legitimasinya dalam menjangkau pasar dan menarik investasi, khususnya di negara-negara berkembang, melalui model pemberian bantuan luar negeri.

Sampai tahun 2021. Indonesia telah menjalankan Kerja sama Selatan – Selatan lebih dari 1.000 program yang diikuti lebih dari 13.000 peserta (Kemlu RI, 2023). Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan intensitas Indonesia dalam membangun kerja sama yang berlandaskan solidaritas. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Indonesia telah memiliki kapabilitas teknis, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang memadai untuk berkembang sebagai *new emerging donor* dalam kancah global.

Selain kapasitas ekonomi Indonesia dalam implementasi, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten dari *Center of Excellence* (Kemsetneg, 2025) Keberadaan pusat keunggulan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kapasitas teknis, tetapi juga pengetahuan kontekstual yang relevan bagi negara-negara berkembang, terutama yang menghadapi tantangan pembangunan serupa. Modal ini memungkinkan Indonesia tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga mitra setara dalam kerja sama pembangunan internasional yang didasarkan pada solidaritas, kesetaraan, dan kemandirian bersama.

Lebih dari sekadar berbagi sumber daya, pendekatan ini mencerminkan transisi Indonesia dari *recipient countries* menjadi *new emerging donor* dalam skema Kerjasama Selatan-Selatan (Helmys dan Irawan, 2023) Dengan demikian, Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari negara penerima menjadi negara donor yang baru muncul. Aspek penting yang perlu ditekankan adalah bahwa posisi Indonesia sebagai negara donor tidak secara otomatis menghilangkan statusnya sebagai penerima manfaat dari kerjasama internasional.

Hal ini tercermin dari fakta bahwa Indonesia masih menerima bantuan dari negara-negara asing, baik dalam bentuk dana, barang, jasa, maupun sekuritas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) tentang Keuangan Negara. Disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan non-pajak, dan hibah. Di sisi lain, Indonesia juga melaksanakan kewajibannya sebagai negara donor untuk membantu negara-negara berkembang di Kawasan Selatan, namun tetap menerima bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Kapasitas Indonesia dalam mengelola bantuan asing juga dikembangkan melalui pembentukan lembaga-lembaga Kerja sama Selatan-Selatan, yaitu Tim Koordinasi Nasional untuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Pembangunan Internasional (Kemlu RI, 2023)

Kedua lembaga ini merupakan pilar institusional utama dalam pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia. Sinergi antara Tim Kornas dan LDKPI merupakan landasan penting dalam membangun sistem kelembagaan yang dapat menjamin keberlanjutan, efektivitas, dan legitimasi diplomasi bantuan luar negeri Indonesia dalam konteks solidaritas Selatan-Selatan dan pembangunan global.

Kerjasama Selatan Selatan Indonesia

Istilah “Selatan” atau “Global South” merujuk pada negara-negara yang mengalami perkembangan dan industrialisasi yang tidak merata, dan terdiri dari bekas koloni di Afrika, Asia, dan Amerika Latin (Wilkinson dan Weiss, 2014). Istilah ini mencerminkan ketidaksetaraan struktural global dan perjuangan negara-negara berkembang untuk memperoleh posisi yang setara dalam sistem politik dan ekonomi internasional. Gagasan tentang Global South mencerminkan tujuan material dan ideologis yang sama di antara negara-negara berkembang yang mulai terbentuk pada era pasca-kolonial dan terus berkembang dalam dinamika politik global.

Gagasan tentang Selatan berorientasi pada urusan dalam dan luar negeri sebagai ekspresi politik dan mempersiapkan diri untuk bermanuver melawan Kawasan Utara (Wilkinson dan Weiss, 2014, hlm. 280) Pendekatan ini mencerminkan strategi negara-negara Selatan untuk menyeimbangkan kepentingan internal dan

eksternal guna memperkuat posisi mereka melawan dominasi negara-negara maju di Utara. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia secara tegas menentang kolonialisme dan imperialisme, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia lahir sebagai bentuk penolakan yang tegas terhadap segala bentuk kolonialisme.

Langkah besar yang diambil oleh negara-negara selatan adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Konferensi Asia-Afrika didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di depan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada tanggal 25 Agustus 1953. Ali Sastroamidjojo menyatakan bahwa peran Indonesia dalam meredakan ketegangan di dunia memerlukan dukungan dari negara-negara dengan status dan situasi serupa, yaitu Asia dan Afrika (Pemerintah Indonesia, 2014). Pernyataan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai pelopor solidaritas Global South, serta upayanya untuk membentuk kekuatan kolektif negara-negara berkembang di hadapan dominasi politik global dan ketegangan geopolitik pasca Perang Dunia II.

Latar belakang pembentukan KAA adalah serangkaian pertemuan antara Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan yang diadakan di Colombo, Sri Lanka pada April dan Bogor, Indonesia pada Desember 1954. Perdana Menteri Ali

Sastroamidjojo sangat vokal menentang intervensi Barat di Asia. Hasil pertemuan ini adalah Konferensi Asia-Afrika yang diadakan pada 18-25 April 1955 di Bandung, Indonesia (Lee, 2010). Pertemuan ini menunjukkan semangat anti-kolonialisme dan solidaritas Asia-Afrika, serta upaya negara-negara berkembang untuk bersatu dalam menghadapi dominasi Barat dan memperjuangkan kedaulatan serta perdamaian dunia. Pertemuan ini menghasilkan “Prinsip-Prinsip Bandung,” yang meliputi 1) *Economic co-operation*, 2) *cultural co-operation*, 3) *Human rights and self-determination*, 4) *Promotion of world peace and cooperation*, dan 5) *Declaration on the promotion of world peace and co-operation* (CVCE, 2017)

Dasasila Bandung menjadi prinsip dasar hubungan internasional antara negara-negara di kawasan Asia-Afrika, menekankan kemerdekaan, kesetaraan, dan penolakan terhadap campur tangan asing, serta menjadi landasan moral bagi perjuangan untuk dekolonisasi dan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. Ada poin menarik dalam prinsip-prinsip ini, yaitu poin 9 tentang promosi perdamaian dan kerja sama, yang berbunyi “*Promotion of mutual interests and co-operation*” (CVCE, 2017). Ini menjadi dasar bagi pengembangan konsep kerja sama dan solidaritas di antara negara-negara di Kawasan Selatan.

Indonesia menerapkan prinsip Bebas-Aktif guna bermanuver dalam dinamika politik global. Indonesia telah melakukan hal ini sejak kemerdekaannya

pada tahun 1945 dengan menunjukkan komitmennya untuk tidak terikat oleh kekuatan manapun dan berpartisipasi secara positif dalam memelihara perdamaian dan ketertiban dunia. Konsep ini diperkenalkan oleh Mohammad Hatta dalam pidato berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang” (Hatta, 1951). Mohammad Hatta juga menekankan bahwa Indonesia sangat mendambakan perdamaian dan kerja sama antar negara sangat penting jika tujuan ini ingin menjadi kenyataan (Hatta, 1953).

Hal ini didukung oleh prinsip-prinsip konstitusional Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 dan 4. Dokumen ini merupakan langkah fundamental bagi Indonesia untuk maju dalam mempromosikan Indonesia yang berdaulat, merdeka, adil, dan sejahtera. Namun, pernyataan di atas merupakan pernyataan implisit yang dibuat oleh pemerintah.

Selama periode Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Sukarno, kebijakan luar negeri Indonesia menjadi lebih radikal daripada sebelumnya, mendefinisikan politiknya sebagai “Perlawanan terhadap Imperialisme-Kolonialisme” dan “Konsentrasi kekuatan nasional” (Batabyal, 2002). Kebijakan luar negeri Indonesia dengan tegas menegaskan bahwa di panggung internasional, Indonesia adalah negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka. Kemerdekaan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergantung pada kekuatan as-

ing, sehingga mempertahankan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas-aktif tetap terjaga. Konsep kemerdekaan ini mencerminkan tekad rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta menolak segala bentuk intervensi atau dominasi pihak luar dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Pada politik luar negeri Soeharto ditandai dengan pergeseran dari gaya yang flamboyan dan radikal pada era Sukarno menuju pendekatan yang lebih moderat dan pragmatis. Soeharto berusaha untuk mengembalikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sukma, 1995). Meskipun terjadi perubahan gaya, kebijakan luar negeri tetap berpegang pada prinsip bebas dan aktif, yaitu kebijakan yang mandiri dan aktif, namun dengan penekanan lebih pada pragmatisme dan pembangunan ekonomi sebagai dasar kebijakan luar negeri. Pada era ini, Indonesia mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas di panggung internasional, terutama sejak pertengahan 1980-an, dengan upaya memperkuat perannya dalam Gerakan Non-Blok dan memperingati Konferensi Asia-Afrika sebagai simbol kembalinya Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa kebijakan luar negerinya berpedoman pada prinsip diplomasi bebas dan aktif yang

berorientasi pada kepentingan nasional. Landasan ini dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia untuk menolak polarisasi dalam tatanan kekuatan global, sambil secara proaktif mempromosikan multilateralisme, perdamaian, dan kerja sama internasional yang adil. Pelaksanaannya bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kedaulatan, pembangunan ekonomi, dan penguatan posisi strategis Indonesia di panggung global.

Analisis Two-Level Games

Pada titik pertemuan antara tingkat analisis negara dan sistem, konsep *two-level games* dapat menjelaskan bahwa para pembuat kebijakan luar negeri selalu berupaya menyeimbangkan tuntutan konstituen domestik dengan dinamika serta keharusan yang muncul di lingkungan internasional secara bersamaan (Breuning, 2007).

Pada Tingkat I, Pemerintah Indonesia berperan sebagai negosiator sekaligus fasilitator dalam implementasi kerja sama Selatan–Selatan untuk membantu negara-negara di kawasan Selatan, khususnya di wilayah Asia-Pasifik. Hal ini terlihat dalam konsistensi Indonesia dalam menyerukan solidaritas Selatan sejak peristiwa KAA 1955 (Kemlu RI, 2023). Pada Tingkat II yang ditunjukkan pada konstituen domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri seperti Tim Kornas KSS, Birokrasi Pemerintah dan Audiens Domestik.

Dalam konteks pemberian bantuan luar negeri kepada anggota Colombo Plan, organisasi ini mengalami perkembangan arah kebijakan yang signifikan pada tahun 1995. Seiring waktu, Colombo Plan mengadopsi orientasi baru dengan menekankan kerja sama Selatan–Selatan, yang bertujuan mendukung pembangunan regional sekaligus memaksimalkan kapasitas lembaga tersebut dalam bidang kerja sama teknis (*The Colombo Plan*, 2024).

Kausalitas dalam konsep kerja sama Selatan – Selatan Indonesia dengan Colombo Plan inilah yang menjadi dorongan Indonesia untuk membuat perjanjian internasional. Jika dilihat dalam birokrasi Pemerintah Indonesia, asas pemberian bantuan ini tertuang dalam RPJMN 2020 -2024 sebagai Upaya optimalisasi kebijakan luar negeri untuk memperkuat KSST guna mendukung perdagangan dan investasi.

Dalam Tingkat I, Pemerintah Indonesia bersama Sekretariat Jenderal Colombo Plan menyepakati *Arrangement between the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia and the Colombo Plan Secretariat on South-South and Triangular Cooperation Programmes* pada 4 Mei 2021 (Kemensetneg, 2025). Didalamnya terdapat kesepakatan bagi Indonesia untuk memberikan pelatihan teknis dalam meningkatkan kapasitas negara anggota Colombo Plan.

Pemberian bantuan teknis yang dilakukan Pemerintah Indonesia masuk kedalam kategori hibah. Melalui peraturan

pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing. Maka secara birokrasi, pemberian ini masuk kedalam dana hibah yang digunakan untuk membantu negara berkembang terutama di Kawasan Selatan.

Pada sektor audiens domestik, kegiatan ini tidak mendapat sorotan yang luas dari masyarakat Indonesia. Temuan penelitian Universitas Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat cenderung bersifat *inward looking* (*Universitas Indonesia*, 2021). Meskipun pemahaman mereka mengenai Kerja Sama Selatan–Selatan masih terbatas, sebagian besar responden tetap mendukung program tersebut dan berharap pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Jika melihat dari posisi Indonesia dalam *win-set*, Indonesia memanfaatkan kerangka kerja sama ini sebagai instrumen untuk mendorong perkembangan ekonomi serta membuka akses pasar di kawasan Asia-Pasifik, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024. Orientasi tersebut juga sejalan dengan arah diplomasi Indonesia dalam kerangka *Pacific Elevation*, yang memberikan nilai tambah berupa perluasan legitimasi Indonesia di kawasan Pasifik. Dengan banyaknya negara di kawasan tersebut, kerja sama ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum multilateral, termasuk dalam perolehan dukungan suara di PBB (Kemlu RI, 2020).

Dalam konteks *win-set* negara-negara anggota Colombo Plan, kolaborasi melalui arah baru kerja sama Selatan–Selatan memungkinkan Indonesia untuk terus memberikan bantuan teknis berupa peningkatan kapasitas bagi masing-masing negara anggota selama perjanjian yang telah diratifikasi tetap berlaku. Upaya ini sejalan dengan misi Indonesia dalam kerangka kerja sama tersebut, yaitu mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 di negara-negara kawasan Selatan (Kemlu RI, 2023).

Dengan demikian, analisis *two-level game* pada Tingkat I dan Tingkat II menunjukkan bahwa kedua arena tersebut dapat berjalan selaras dan saling menguatkan, terutama ketika kepentingan nasional dan kebutuhan domestik berada dalam titik temu. Dukungan domestik yang relatif kuat memberikan legitimasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin kesepakatan dengan Colombo Plan. Selain itu, hal ini turut mendorong tercapainya tujuan utama kerja sama antara Indonesia dan Colombo Plan.

Implementasi Bantuan Luar Negeri Indonesia

Indonesia dan Colombo Plan telah bekerja sama sejak 2010, selama periode tersebut mereka telah menyelenggarakan 17 program peningkatan kapasitas dengan 191 peserta dari 18 negara (Kemensetneg, 2025). Pada 2021, Indonesia memperkuat kerja samanya dengan menandatangani perjanjian berjudul “*Arrangement Between*

of The Minister of State Secretariat of The Republic of Indonesia and The Colombo Plan Secretariat on South-South and Triangular Cooperation Programmes.” yang kemudian diperpanjang hingga 2027 (Kemensetneg, 2025). Dalam dokumen ini, pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama di bidang Perubahan Iklim, Industri Kecil dan Menengah, Pemberdayaan Perempuan, serta Inovasi dan Manajemen Pengetahuan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Partisipan
1	<i>Training of Trainers on Climate Field School (ToT-CFS) Tahun 2021 & 2023</i>	Vietnam, Nepal, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, dan Filipina
		Filipina, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Papua Nugini, Myanmar, Timor Leste, Indonesia, dan Nepal

2	The Innovation of Women Owned Small and Medium Industry to Empower Community during the Covid-19 Pandemic Tahun 2021	Vietnam, Malaysia, Bhutan, Pakistan, Laos, Sri Lanka, Myanmar, Maladewa, Indonesia, Filipina, Nepal, Bangladesh, dan India
3	South-South and Triangular Essential Training Program on Provision Climate Information for Sectors Tahun 2022	Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Papua Nugini, Indonesia, Nepal, Laos, dan Myanmar
4	Capacity Building Program on Enhancing the Development of Small Medium Industry Tahun 2022	Colombo Plan, yaitu Arab Saudi, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Laos, Maladewa, Malaysia, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka
5	Knowledge Sharing Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry in Fostering Industry Development through Innovation and Intellectual Property Initiative Tahun 2024	Iran, Fiji, Indonesia, Bhutan, Arab Saudi, India, dan Laos

6	Knowledge Sharing Program on Library Transformation Based on Social Inclusion Tahun 2024	Vietnam, Filipina, Thailand, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Maladewa, Malaysia, Laos, Bhutan, dan Bangladesh
7	Capacity Building Program for Trainers on the Development of Climate Services for Sectors Tahun 2024	Fiji, Indonesia, Bhutan, Iran, Maladewa, Filipina, Laos, Nepal, Malaysia, dan Pakistan

Terdapat juga bantuan pengembangan kapasitas yang diberikan secara langsung kepada negara sasaran melalui LDKPI meliputi:

No	Nama Kegiatan	Partisipan
1	Executive Training on Customs Modernization for Timor-Leste Customs Authority (TLCA) Officers Tahun 2023	Timor Leste

2	Timor-Leste Financial Management Reform Program: Penyiapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta tahun 2024 - 2027	Timor Leste
3	Bantuan Dukungan Pendidikan Untuk Mahasiswa Pascasarjana tahun 2022	Afghanistan
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan Ibu dan Anak. 2022	Afghanistan

Kementerian Sekretariat Negara berperan sebagai inkubator yang mengidentifikasi kebutuhan negara peserta program Capacity Building. Setiap kegiatan diikuti 20 peserta yang mempresentasikan kondisi dan kebijakan negara masing-masing. Pada akhir pelatihan, setiap negara menyusun rencana aksi

untuk diimplementasikan di negaranya. Rencana aksi ini menjadi motivasi dan gagasan hasil pelatihan, yang implementasinya dipantau oleh Pemerintah Indonesia (Kemensetneg, 2025). Indonesia secara aktif memajukan agenda pembangunan global melalui Kerja Sama Selatan-Selatan, salah satunya dengan memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas. Dalam pemberian bantuan luar negeri, Indonesia mengarahkan potensi yang lebih besar untuk menjadi proyek LDKPI (Kemensetneg, 2025). Upaya ini merupakan kontribusinya nyata Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga penyedia bantuan pembangunan.

KESIMPULAN

Pemberian bantuan luar negeri Indonesia kepada negara anggota Colombo Plan didasarkan pada UUD 1945, Pancasila dan GBHN yang kemudian menjadi RPJMN/RPJPN. Dalam mengatur pemberian bantuan ini, Pemerintah melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Selatan – Selatan. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada negara anggota colombo plan berupa bantuan teknis yang berbentuk pelatihan yang difasilitasi Indonesia dan dikategorikan sebagai hibah, bukan pendanaan secara langsung.

Dalam menanggapi kebijakan ini, masyarakat cenderung bersifat *inward-looking*. Meskipun pemahaman mereka

terhadap Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) masih terbatas, survei menunjukkan bahwa publik tetap mendukung program tersebut karena diyakini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Lowy Institute Indonesia Poll (2021), di mana 80% responden menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada negara berkembang merupakan prioritas dalam agenda perdamaian Indonesia. Dukungan ini merefleksikan keyakinan publik bahwa bantuan luar negeri berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam membangun stabilitas dan solidaritas global.

Kenaikan status Indonesia juga dari *Lower-Middle Income Country* menjadi *Upper-Middle Income Country* merupakan tonggak penting dalam transformasi dari *recipient country* menjadi *new emerging donor* di kawasan Selatan. Selain didukung oleh kapasitas ekonomi yang semakin menguat, Indonesia juga memiliki modal sumber daya manusia yang kompeten melalui sejumlah *center of excellence* di berbagai bidang. Dukungan kelembagaan semakin diperkuat dengan keberadaan LDKPI yang berperan sebagai pengelola dana abadi untuk mendanai kegiatan kerja sama ini secara berkelanjutan.

Melalui Analisis *two-level games* menunjukkan bahwa kebijakan bantuan Indonesia kepada Colombo Plan berhasil menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional. Pada *Level II*, dukungan publik memberikan legitimasi, sedangkan

pada *Level I*, kerja sama digunakan sebagai instrumen strategis untuk memperluas pengaruh diplomatik dan ekonomi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik, sekaligus mendukung pencapaian SDGs.

REFERENSI

- Batabyal, A. (2002) "Change and Continuity in Indonesian Foreign Policy: From Sukarno, Subarto to Megawati," *SAGE Journal*, 6(1), hlm. 19–44.
- Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri (2025) "Wawancara Kerja sama Selatan - Selatan."
- Breuning, M. (2007) *Foreign policy analysis: a comparative introduction*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan.
- CVCE (2017) "Final Communiqué of the Asian-African conference of Bandung." CVCE. Tersedia pada: https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585/publishable_en.pdf.
- Hatta, M. (1951) *mendajung antara dua karang*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Hatta, M. (1953) "Indonesia's Foreign Policy," *Foreign Affairs*, 31(3), hlm. 441. Tersedia pada: <https://doi.org/10.2307/20030977>.
- Helmys, N. dan Irawan, Y. (2023) "Identitas Indonesia sebagai Negara Donor pada Kerja Sama Selatan-Selatan selama Presidensi G20," *JURNAL HUBUNGAN LUAR NEGERI*, 8(2), hlm. 31–54.

- Tersedia pada: <https://doi.org/10.70836/jh.v8i2.15>.
- Hutabarat, L.F. dan Damayanti, A. (2023) "Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan," *Intermes-tic: Journal of International Studies*, 7(2), hlm. 428. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24198/intermes-tic.v7n2.3>.
- Kementerian Luar Negeri RI (2020) *Rencana Strategi Direktorat Sosial Bu-daya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Periode 2020 – 2024*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kementerian Luar Negeri RI (2020) *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024*. Jakarta.
- Kementerian Luar Negeri RI (2023) *Perjal-anan Satu Dekade KSS Indonesia: Kontribusi Bagi Tercapainya Pem-bangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Uni-versitas Indonesia Publishing.
- Kementerian Luar Negeri RI (2020) *Re-Ori-ent Webinar Series Ep.4: Pacific Eleva-tion: Diplomasi Indonesia di Pasifik*. Tersedia pada: <https://www.youtube.com/watch?v=m4wPsAtgWow> (Diakses: 26 Mei 2025).
- Leon, H. (1964) "The Council for Mutual Economic Assistance: Strength and Weaknesses," *U.S. Naval War College Press*, 16(9), hlm. 15–36.
- Negara, K.S. (2025) *Kementerian Sekretariat Negara Menandatangani Perjanjian Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dengan Colombo Plan* | Sekretariat Negara. Tersedia pada: <https://www.setneg.go.id/baca/in-dex/kementerian sekretar-iat negara menandatangani perjan-jian kerja sama selatan se-latan dan triangular dengan co-lombo plan> (Diakses: 29 Januari 2025).
- Negara, K.S. (2025) *Terus Berkomitmen dalam Agenda Pembangunan Berke-lanjutan, Indonesia kembali Jalin Kerja Sama dengan Colombo Plan* | Sekretar-iat Negara. Tersedia pada: <https://www.setneg.go.id/baca/in-dex/terus berkomitmen da-lam agenda pembangunan berke-lanjutan indonesia kem-bali jalin kerja sama dengan co-lombo plan> (Diakses: 3 Februari 2025).
- The Colombo Plan* (2024). Tersedia pada: <https://colombo-plan.org/> (Diakses: 9 Desember 2025).
- Pemerintah Indonesia (2007) "Undang-Un-dang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan-jang Nasional (RPJPN) 2005-2025."
- Sukma, R. (1995) "The Evolution of Indo-nesia's Foreign Policy: An Indonesian View," *Asian Survey*, 35(3), hlm. 304–315. Tersedia pada: <https://doi.org/10.2307/2645547>.
- The Marshall Plan: Dawn of the Cold War* (2025). Tersedia pada: <https://www.cfr.org/book/marshall-plan> (Diakses: 27 Januari 2025).
- Trinidad, D. (2014) *South-South Coopera-tion in Southeast Asia and the Role of*

Japan. Chiba: Institute of Developing Economies, Japan External Organization (F.V.R, 489).

United Nations (tanpa tanggal) *United Nations System Wide Strategy on South-South and Triangular Cooperation for Sustainable Development*.

Universitas Indonesia *Webinar Nasional: Penguatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan* (2021).

Tersedia pada:
https://www.youtube.com/watch?v=Um_Whpweh3o (Diakses: 11 Mei 2025).

Wakil Presiden Republik Indonesia (2019) *Peluncuran Indonesia-AID Wujud Diplomasi 'Tangan Di Atas'*. Tersedia pada:
<https://www.wapresri.go.id/peluncuran-indonesia-aid-wujud-diplomasi-tangan-di-atas/> (Diakses: 26 Mei 2025).